

HARIAN

LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

EDISI SENIN, 03 JUNI 2024



KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com

**VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021**

www.lenteratoday.com

[@lenteratoday](https://www.instagram.com/lenteratoday)

[@lenteratoday](https://www.twitter.com/lenteratoday)

[@lenteratoday](https://www.tiktok.com/@lenteratoday)

[lentera.tv](https://www.facebook.com/lentera.tv)

[Lentera TV Media](https://www.youtube.com/LenteraTVMedia)

SUDAH 61 WNI DITANGKAP DI ARAB SAUDI

Palsukan Visa Haji: 3 Diperiksa Kejaksaan, Koordinator Diburu

**Government (Hal.2)
Menteri Bahliil Sebut
Izin Tambang Khusus
Ormas Islam PBNU
Segera Terbit**

Dalam sepekan terakhir setidaknya 61 warga negara Indonesia (WNI) ditangkap di Arab Saudi. Penyebabnya mereka memalsukan visa haji. Terbaru pada Sabtu (1/6/2024), 37 WNI asal Makassar ditangkap aparat setempat di Madinah Arab Saudi karena visa non haji. Empat hari sebelumnya atau tepatnya pada Selasa (28/5/2024), sebanyak 24 WNI diamankan aparat keamanan Arab Saudi di Miqat Masjid Bir Ali Madinah. Para WNI tersebut dilarang masuk Makkah karena menggunakan visa ziarah untuk berhaji. Berdasarkan informasi terakhir dari otoritas Arab Saudi, Yusron menjelaskan bahwa 22 jamaah tersebut akan dibebaskan. Sementara 2 orang koordinator bakal diproses hukum bersama supir dan pemilik bus.

Baca di hal 11....

PENANGKAPAN WNI DI ARAB SAUDI



1 JUNI 2023

Otoritas keamanan Arab Saudi kembali menahan 37 WNI di Madinah karena diduga berniat berhaji hanya dengan visa ziarah. Mereka terdiri dari 16 perempuan dan 21 laki-laki asal Makassar. Mereka terbang dari Indonesia ke Doha, lalu ke Riyadh, dan ditahan polisi saat perjalanan ke Madinah. Pemeriksaan menemukan mereka menggunakan atribut haji palsu yang biasa dipakai jamaah calon haji resmi Indonesia.



28 MEI 2023

Ada pengamanan 24 WNI yang dilakukan oleh polisi Saudi di Masjid Bir Ali, Madinah pada Selasa (28/5/2024). Mereka dipulangkan ke tanah air.

ATURAN BARU DARI PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI TERKAIT PELAKSANAAN HAJI 2024.

- **Vaksinasi dan Verifikasi Kesehatan di Aplikasi Sehat**
Jamaah haji perlu verifikasi vaksinasi melalui aplikasi Sehaty. Mereka wajib vaksin meningitis dan melampirkan surat keterangan bebas penyakit menular.
- **Wajib Kantongi Izin**
Otoritas Saudi memperketat akses ke Makkah. Tanpa izin resmi, termasuk izin bekerja, tanda pengenal, izin umrah, atau haji, penduduk akan ditolak masuk di pos keamanan.
- **Wajib Pakai Visa Haji, Haji Tanpa Visa Resmi Tidak Sah**
Aturan utama haji: wajib visa resmi. Saudi tegaskan: haji tanpa visa ilegal. Kementerian Haji dan Umrah Saudi tegas: haji tanpa visa resmi tidak sah.
- **Kartu Nusuk untuk Akses Layanan Haji**
Kementerian Haji dan Umrah Saudi meluncurkan kartu Nusuk atau Smart Card untuk setiap jamaah.
- **Visa Haji Terbatas untuk Izin Masuk Jeddah, Madinah, dan Makkah**
Visa haji hanya untuk kunjungan di Jeddah, Madinah, dan Makkah, bukan untuk bekerja atau tinggal di luar wilayah itu.



Menteri Bahlil Sebut Izin Tambang Khusus Ormas Islam PBNU Segera Terbit

Beberapa Ormas Keagamaan di Indonesia:

ISLAM

Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Sarekat Islam, Persatuan Umat Islam (PUI), Al-Irsyad Al-Islamiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Mathlaul Anwar, Al-Jam'iyatul Washliyah, Persatuan Islam (Persis), Darud Dakwah Wal Irsyad, Wanita Islam, Alkhairaat, DDII, dan Hidayatullah.

KRISTEN

Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII), Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia (PGPI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), dan Persekutuan Gereja-Gereja Tionghoa Indonesia (PGTI).

KATOLIK

Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Wanita Katolik RI (WKRI), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI (PMKRI).

HINDU

Lembaga Pengembangan Dharma Gita, Peradah Indonesia, Wanita Hindu Dharma Indonesia.

BUDDHA

Majelis Agama Buddha Theravada, Pemuda Theravada Indonesia, Majelis Buddhayana Indonesia, Wanita Buddhis Indonesia, dan Yayasan Lumbini.

KONGHUCU

Majelis Tinggi Agama Khonghucu (Matakin).



Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (LHK), Siti Nurbaya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bhelland Eriksen.

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut akan segera menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan Islam Nahdlatul Ulama (NU).

Hal itu disampaikan setelah sebelumnya pemerintah resmi membuat aturan yang memberikan izin bagi ormas keagamaan untuk dapat mengelola IUP.

Izin itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

"Tidak lama lagi saya akan teken IUP untuk kasih PBNU [Pengurus Besar Nahdlatul Ulama] karena prosesnya sudah hampir selesai. Itu janji saya kepada kalian," ujar Bahlil saat memberikan kuliah umum di Perguruan Tinggi NU, dilansir melalui Kanal resmi YouTube BKPM, Minggu (2/6/2024).

Bahlil mengatakan, bentuk IUP yang akan diberikan kepada ormas Keagamaan terbesar di Tanah Air ini yakni konsesi tambang batu bara, yang disebut memiliki cadangan cukup besar.

Di sisi lain, Muhammadiyah mengatakan perizinan merupakan wewenang pemerintah meski harus ada syarat yang dipenuhi. "Terkait dengan kemungkinan Ormas keagamaan dapat mengelola tambang itu merupakan wewenang Pemerintah. Kemungkinan Ormas Keagamaan mengelola tambang tidak otomatis karena harus memenuhi persyaratan," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti saat dihubungi, Minggu (2/6/2024).

Abdul Mu'ti mengungkapkan sampai saat ini belum ada pembicaraan terkait izin pengelolaan tambang

tersebut kepada Muhammadiyah. Dia mengatakan jika nantinya ada penawaran, Muhammadiyah akan membahasnya dengan seksama agar tidak menimbulkan masalah bagi organisasi dan masyarakat.

"Sampai sekarang tidak ada pembicaraan Pemerintah dengan Muhammadiyah terkait dengan kemungkinan pengelolaan tambang.

"Kalau ada penawaran resmi Pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan seksama. Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara," imbuhnya.

Menteri LHK Bantah Bagi-bagi

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menegaskan pemberian izin tambang ke ormas-ormas keagamaan memungkinkan diberikan kepada sayap-sayap organisasinya yang bergerak di lini bisnis.

Ia mengatakan kondisi ini lebih baik ketimbang ormas-ormas tersebut mengajukan proposal untuk pendanaan tiap harinya.

"Nah, ormas itu pertimbangannya itu tadi karena ada sayap-sayap organisasinya yang memungkinkan. Dapudapa ormasnya setiap hari nyariin proposal, minta apa, apa namanya mengajukan proposal, kan lebih baik dengan sayap bisnis yang rapi dan tetap profesional. Itu sih sebetulnya," kata Siti di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (2/6/2024).

Siti mengatakan tak melulu harus ormas keagamaan yang bisa mendapatkan izin tambang tersebut. Baginya, Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 telah mengamanatkan pemerintah untuk memberikan ruang produktivitas kepada masyarakat.

Karena itu, Siti menilai pemberian izin tambang ini sebagai upaya membuat produktivitas kepada masyarakat melalui ormas.

"Jadi ruang-ruang produktivitas rakyat apapun salurannya harusnya diberikan. Maka ada hutan sosial diberikan kepada rakyat. Ada misalnya nanti apa ya petugas petugas yang di bawah banget yang miskin itu juga harusnya dipikirkan, karena produktif itu kan hak rakyat gitu ya yang harus diperhatikan oleh negara," kata dia.

Siti juga memastikan izin pengelolaan tambang ke ormas keagamaan tersebut tetap dilakukan secara profesional. Caranya melalui sayap bisnis masing-masing ormas.

Ia pun membantah jika pembagian izin tambang oleh pemerintah sebagai cara 'bagi-bagi kue' dari pemerintah ke ormas.

"Enggak, enggak [bagi-bagi kue]. Hayo, makanya liat dari dasarnya," kata Siti.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi memberikan izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Lewat aturan ini Jokowi mengatur izin tambang kepada ormas keagamaan. PP Nomor 25 Tahun 2024 ini ditetapkan Jokowi pada 30 Mei 2024 dan berlaku efektif pada tanggal diundangkan.

Di beleid tersebut, landasan hukum untuk memberikan izin tambang mineral dan batu bara (minerba) kepada ormas keagamaan dimunculkan, salah satu ketentuan yang diperbarui terkait wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). (wid,rls,ist,kum/dya)

DPR Didesak Hentikan Pembahasan Revisi UU Polri Koalisi Masyarakat Sipil Sebut 'Ada Udang di Balik Batu'



Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian memberikan pernyataan sikap terkait revisi UU Polri yang dibacakan di Kantor LBH Jakarta, Minggu (2/6/2024). (Ist)

JAKARTA-Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri). Sebab, pembahasan revisi UU Polri menuai banyak kontroversi dari publik.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan menolak dengan keras revisi UU Polri yang menjadi inisiatif DPR RI tersebut.

Isnur menilai, pembahasan revisi UU Polri terlalu terburu-buru hingga melahirkan pasal-pasal yang dianggap serampangan. Bahkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga UU Polri itu dinilai 'ada udang di balik batu' alias sarat kepentingan politik.

"Pembentukan UU baru semestinya memperkuat cita-cita reformasi untuk penguatan sistem demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia dalam rangka melindungi warga negara bukan justru sebaliknya mengancam demokrasi dan hak asasi manusia," ucapnya dikutip Minggu (2/6/2024).

Di satu sisi, masih banyak pembahasan undang-undang lain yang sekiranya dapat menjadi prioritas DPR, seperti KUHAP, RUU PPRT, RUU Perampasan Aset, RUU Penyadapan, RUU Masyarakat Adat dan lain-lain.

"Mendesak pemerintah dan parlemen untuk melakukan evaluasi yang serius dan audit yang menyeluruh pada institusi Kepolisian dengan melibatkan masyarakat sipil dan lembaga HAM negara," ujar Isnur.

"Mendesak pemerintah dan parlemen untuk memperkuat pengawasan kerja Kepolisian, baik dalam hal penegakan hukum, keamanan negara, maupun pelayanan

masyarakat, yang mampu memberikan sanksi tegas kepada individu pelaku dan juga perbaikan institusional untuk mencegah pelanggaran serupa terjadi pada masa mendatang," sambung dia seraya menutup.

Senada, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, menuturkan, peran besar Polri dalam hal intelijen tercantum dalam Pasal 16A.

"Yang itu berkaitan dengan kewenangan penggalangan intelijen, yang mana menjadi pembahasan yang cukup sentral terkait diskursus RUU Polri," ungkap Dimas.

Lebih lanjut, menilai peran dari kepolisian tidak hanya melakukan fungsi-fungsi intelijen, namun juga bentuk-bentuk penggalangan intelijen. Dalam hal ini, Polri dapat melakukan upaya proaktif untuk memetakan sasaran dalam melakukan perubahan atau memengaruhi perilaku dari target sasaran yang menjadi objek kegiatan intelijen.

Dimas menilai, jika revisi aturan Polri diketok, kepolisian akan semakin memiliki legitimasi untuk dapat memengaruhi partisipasi publik dan sarana mekanisme penyampaian pendapat yang ada di masyarakat. Lebih lanjut, dia menuturkan, masyarakat tidak akan lagi bisa menyampaikan pendapat secara kritis dan riil (genuine).

"Tapi ada tindakan-tindakan manipulatif yang bisa dilakukan dengan upaya-upaya dalam memengaruhi perilaku dan juga pendapat dengan sarana intelijen," kata Dimas.

RUU TNI Juga Disorot

Sementara, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus

mengatakan, prinsipnya kalau TNI aktif bisa bekerja dimana saja sesuai keinginan Presiden, TNI itu sudah menjadi seperti warga sipil lainnya.

"Jelas ini bertentangan dengan fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara," ujar Lucius saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (2/6).

Persoalannya TNI aktif sebagai prajurit, sudah pasti akan tunduk pada hirarki militer. Ia tak bisa begitu saja mengabdikan pada lembaga sipil dan tunduk pada hirarki lembaga sipil dimana ia bergabung.

Diketahui, dalam draf revisi UU TNI Pasal 47 ayat (2) menyatakan bahwa "Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung, serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden.

"Pasti ada persoalan dalam hal koordinasi yang membuat TNI sudah pasti tak bisa bekerja di instansi sipil," terang Lucius.

Formappi juga menyoroti TNI dengan organisasi pertahanannya tentu akan terganggu ketika banyak prajurit aktifnya bekerja di lembaga sipil.

Hal itu menimbulkan pertanyaan bagaimana tanggung jawab pertahanan masih bisa diandalkan ketika TNI yang seharusnya bertugas untuk itu justru sibuk dengan urusan kekuasaan sipil.

Dan yang paling penting, praktik TNI bisa bekerja dimana saja itu yang di era reformasi ditentang hingga melahirkan pemisahan antara TNI dan Polri sekarang.

5 HAL YANG PENTING DICERMATI DALAM RUU POLRI

Pertama, memperluas kewenangan Polri untuk juga melakukan pengamanan, pembinaan dan pengawasan terhadap ruang siber yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan saling bertentangan dengan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kedua, RUU Kepolisian juga menambahkan pasal mengenai perluasan kewenangan untuk melakukan penyadapan, dan perluasan kepada bidang Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polri. Perluasan itu memberi kewenangan Polri untuk melakukan penggalangan intelijen, yang dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dengan Badan Intelijen Negara dan pengaturannya kabur karena absen UU khusus terkait penyadapan.

Ketiga, RUU Kepolisian tidak memperkuat dan menegaskan posisi serta kewenangan lembaga pengawas atau oversight terhadap Polri, seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas).

Keempat, terkait masih diaturnya Pam Swakarsa. Indonesia punya pengalaman buruk terhadap isu Pam Swakarsa yang mulai marak saat 1998. Saat itu Pam Swakarsa memang sengaja dibentuk oleh pemerintah Orde Baru untuk tujuan tertentu, salah satunya mengamankan Sidang Istimewa MPR dan menghalau kelompok-kelompok masyarakat dan mahasiswa yang ingin menuju gedung parlemen saat itu.

Kelima, bertambahnya batas usia pensiun. Revisi UU Polri Pasal 30 ayat (2) huruf a dan b juga mengatur perpanjangan batas usia pensiun anggota Polri. Dalam pasal tersebut, batas usia pensiun polisi dengan jabatan bintang dan tamtama adalah 58 tahun. Jika dibutuhkan organisasi, batas usia pensiun bintang diperpanjang mencapai 60 tahun. Sementara polisi berpangkat perwira memiliki batas usia pensiun 60 tahun. Perwira yang punya keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat diperpanjang masa kerjanya paling lama 2 tahun. RUU Polri juga mengatur usia pensiun 65 tahun bagi anggota tersebut menduduki jabatan fungsional. Juga diatur batas usia pensiun Kapolri dapat diperpanjang melalui Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapat pertimbangan dari DPR. Namun, tidak diatur secara rinci berapa lama batas usia maksimum pensiun Kapolri bisa diperpanjang.

Ini dimaksudkan agar fungsi kedua lembaga itu tak bisa dicampur aduk dan agar TNI fokus pada bidang pertahanan saja.

"Biarkan sipil untuk urusan pekerjaan yang menjadi ranah sipil," ucap Lucius. (wid,rls,lip,ist/Dya)

Panen Parsial Perdana di 2024, IBL Boncong Tuban Hasilkan 5 Kuintal Udang Vaname



TUBAN-Instalasi Budidaya Laut (IBL) Boncong Tuban, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur, melakukan panen parsial udang vaname di Desa Boncong, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Selasa (23/4/2024).

Pada panen parsial pertama di tahun 2024, IBL Boncong mampu menghasilkan udang vaname berbagai ukuran hingga 5 kuintal atau 500 kg.

Kepala IBL Boncong Tuban, DKP Jawa Timur, Sublandri, mengemukakan, dari 5 kolam yang ada

di IBL Boncong, ada 2 kolam yang digunakan budidaya udang vaname, sementara 3 kolam lain untuk ikan kerapu.

Dari 2 kolam tersebut, 1 kolam mulai bisa panen. Dengan sistem panen parsial atau sebagian. Tujuannya, untuk mengurangi kepadatan populasi udang di kolam yang over kapasitas dan menjaga kadar oksigen air, karena sejalan dengan semakin besarnya udang. "Dengan demikian, ukuran udang bisa optimal," ujar Sublandri.

Sementara, lanjut Sublandri, satu kolam lainnya baru bisa panen beberapa bulan ke depan. Sebab jadwal penaburan benih udang di kedua kolam berbeda.

Sublandri menambahkan, setiap satu kolam yang berukuran 1.000 meter persegi ditebar 200.000 benur udang. Dari jumlah tersebut, jika optimal, IBL Boncong bisa memanen udang hingga 3 ton. Namun rata-rata mampu panen 2 ton lebih.

Pria asal Blitar ini juga menyampaikan, udang vaname yang

dipanen akan langsung dikirim ke cold storage. Untuk selanjutnya di impor ke Uni Eropa, Cina, Taiwan dan Amerika.

Harganya bervariasi mulai paling rendah Rp 52 ribu per kg sampai Rp 90 ribu per kg, tergantung ukuran udang. "Hasil dari penjualan tersebut nantinya akan masuk ke PAD Provinsi Jatim," imbuhnya.

Sublandri juga mengemukakan jika pada tahun 2023 lalu, IBL Boncong mampu menyetorkan PAD ke Provinsi Jatim sebesar Rp 800 juta lebih. (ADV)

Polri Ajukan Barter Buronan Thailand Chaowalit dengan Gembong Narkoba Fredy Pratama

JAKARTA-Polri telah menangkap buronan paling dicari di Thailand, Chaowalit Thongduang, di Badung, Bali, Kamis (30/5/2024) lalu. Penangkapan Chaowalit mendapat respons positif dari pemerintah dan kepolisian Thailand.

Tertangkapnya Chaowalit ini, membawa harapan baru untuk Polri terhadap kepolisian Thailand. Polri ingin kepolisian Thailand juga maksimal untuk menangkap gembong narkoba Fredy Pratama yang bersembunyi di hutan Thailand.

"Kita kan join nih. Ada budi, ada balas lah. Ada ubi ada talas. Kita juga minta demikian dong," kata Dirnarkoba Bareskrim Brigjen Pol Mukhti Juhasa di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Minggu (2/6/2024).

Mukhti menyebut, Polri akan mengajukan Chaowalit sebagai barter

dengan Fredy Pratama jika sudah tertangkap. Artinya, Chaowalit akan dikembalikan ke Thailand, sementara Fredy akan diproses hukum di Indonesia.

"Dia kan gembong besar. Ya saling tuker aja. Barter. Itu yang kita inginkan," jelasnya.

Chaowalit Thongduang alias Sia Paeng Nanod (38), merupakan tahanan kasus percobaan pembunuhan terhadap seorang polisi dalam rangkaian percobaan penculikan pada 2 September 2019 di provinsi Phatthalung, Thailand.

Dia divonis 20 tahun enam bulan oleh Pengadilan Phatthalung pada Januari 2022. Chaowalit lalu dipindahkan ke penjara Nakhon Si Thammarat pada 7 Agustus 2023.

Pada 20 Oktober 2023, Chaowalit dibawa sipir penjara ke RS Maharat

Nakhon Si Thammarat untuk perawatan gigi. Setelah sampai di sana, dokter menunda pemeriksaan itu.

Saat hendak dibawa kembali ke Penjara, Chaowalit terjatuh ke lantai. Ia lalu dirawat di lantai 6 rumah sakit tersebut. Di tempat tidur kakinya diborgol, sementara ada 2 sipir yang ditugaskan untuk mengawasinya.

Pada Minggu 22 Oktober pagi, Chaowalit dilaporkan hilang. Polisi dan tentara Thailand ditugaskan membantu pencarian Chaowalit. Komandan penjara menawarkan hadiah 100 ribu Baht bagi yang mengetahui keberadaan Chaowalit.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada mengungkapkan proses pelarian diri Chaowalit hingga kemudian berlabuh di Indonesia. Wahyu menyebut, Chaowalit masuk ke

Indonesia sejak 8 Desember 2023 silam melalui jalur laut.

"Diketahui buronan tersebut dia masuk ke Indonesia pada 8 Desember 2023 melalui jalur perairan laut Thailand menggunakan speed boat 200 PK, memakan waktu perjalanan 17 jam," ujar Wahyu dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Minggu (2/6/2024).

Sesampainya di Indonesia, lanjut dia, Chaowalit dibantu oleh seseorang WNI berinisial FS, yang juga membantunya untuk membuat identitas palsu atas nama Sulaiman.

"Kemudian, sampai di Indonesia ada WNI inisial FS yang sebelumnya sudah dikenalkan saksi di Thailand untuk membantu buronan membuat identitas palsu sebagai WNI atas nama Sulaiman," jelasnya. (wid,rls, ist,ant/dya)

Evaluasi PIPP: UPT PPP Tamperan Pacitan Raih Capaian Positif di Maret 2024



PACITAN-Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan Pacitan meraih capaian positif pada Evaluasi Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) di Bulan Maret 2024. UPT PPP Tamperan meraih nilai 87.25 dengan predikat 'Sangat Baik'.

Penilaian ini didapat berdasarkan beberapa parameter yaitu penyediaan pelayanan, produksi perikanan, realisasi anggaran dan penerimaan, serta kepatuhan entri data di dalam website PIPP.

Secara nasional, volume produksi PPP Tamperan di Bulan Maret 2024 menduduki peringkat 10 dari 167 Pelabuhan Perikanan UPT Daerah yang terdaftar pada website PIPP.

Sedangkan pada wilayah Jawa Timur, PPP Tamperan menduduki peringkat ketujuh setelah PPP Pondokdadap terhadap evaluasi kinerja bulanan PIPP bulan maret 2024.

Volume produksi perikanan UPT PPP Tamperan pada Bulan Maret 2024 mencapai 311.577 Kg, dengan nilai produksi mencapai Rp. 5.877.101.000. Volume produksi harian PPP Tamperan mencapai 10,051 ton per hari melampaui target PIPP yang memiliki standar produksi sekitar 5 ton perhari.

Bulan Maret sebenarnya sudah masuk dalam musim penangkapan ikan, namun aktivitas perikanan di PPP Tamperan masih belum seramai tahun 2023. Meski begitu, kegiatan

bongkar kapal perikanan tetap menggeliat. Secara garis besar, ikan yang didaratkan di PPP Tamperan berasal dari kategori ikan pelagis besar.

Dari segi pelayanan, PPP Tamperan melayani setidaknya 64 kapal perikanan dengan nilai tonase total sebesar 505 Gross Ton di Bulan Maret 2024.

Dibandingkan Bulan Februari 2024, hasil produksi perikanan justru mengalami penurunan dari 635.123 Kg menjadi 311.577 Kg di Bulan Maret. Penurunan ini disebabkan oleh faktor cuaca yang tidak menentu yang melanda Pesisir Selatan Pacitan



selama awal hingga pertengahan Bulan Maret.

Beberapa jenis ikan yang didaratkan pada Bulan Maret 2024 diantaranya adalah ikan cakalang, layang, tuna sirip kuning (madidihang), tongkol, lemadang, dan layang.(ADV)

Pengusaha hingga Buruh Bakal Bawa Aturan Tapera ke MA dan MK

JAKARTA-Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berencana membawa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat ke Mahkamah Agung (MA).

"Kalau PP 21/2024 sedang kita pikirkan apa yang mau kita bawa ke Mahkamah Agung," kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, dikutip Minggu (2/6/2024).

Pasalnya, PP tersebut mewajibkan pemberi kerja (perusahaan swasta) untuk mendaftarkan karyawannya menjadi peserta tabungan perumahan rakyat (tapera). Padahal menurut Shinta, aturan terkait iuran tapera

boleh saja dibuat, akan tetapi bentuknya seharusnya adalah sukarela dan bukan suatu kewajiban setiap pekerja.

"Tapi kami tegaskan di sini, yang menjadi permasalahan adalah mengenai aspek konsep tabungan. Kalau tabungan itu seharusnya sukarela," tegasnya.

Dari sisi buruh, Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bakal ada ribuan buruh demo di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (6/6/2024) menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Iqbal mengatakan para pekerja yang akan turun ke jalan juga bagian dari Konfederasi Serikat Pekerja

Indonesia (KSPI). Ia menegaskan buruh menuntut Presiden Joko Widodo mencabut aturan soal Tapera yang dianggap memberatkan pekerja.

"Mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 24 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (PP Tapera)," tegas Iqbal dalam keterangan resminya, Minggu (2/6/2024).

"Partai Buruh dan KSPI akan mempersiapkan aksi besar yang akan diikuti ribuan buruh pada Kamis, 6 Juni di Istana Negara, Jakarta, dengan tuntutan mencabut PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera dan merevisi UU Tapera," imbuh Iqbal.

Selain turun ke jalan, Partai Buruh berjanji mengajukan judicial review

UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu dekat. Mereka juga akan melakukan judicial review PP Tapera ke Mahkamah Agung (MA).

Tapera makin memicu penolakan karena para pekerja informal driver ojek online (ojol), taksi online, hingga kurir menolak iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Iuran Tapera sendiri dibayarkan sebesar 3% dari total penghasilan setiap bulan.

Wacananya iuran ini juga bakal diterapkan pada pekerja mandiri atau pekerja yang tidak mendapatkan penghasilan tetap dari perusahaan setiap bulan. Driver ojol cs beberapa di antaranya.(wis,rls,ist/dya)

Sebabkan Banjir, Komisi C DPRD Kota Malang Instruksikan Bangunan di Perumahan Sigura-gura Dibongkar



Komisi C DPRD Kota Malang bersama Kepala Dinas PUPR-PPK Kota Malang saat meninjau bangunan yang menyalahi siteplan di Perumahan Sigura-gura, Kecamatan Lowokwaru. (Santi/Lenteratoday)

MALANG - Komisi C DPRD Kota Malang menginstruksikan pembongkaran bangunan Kavling 21 di Perumahan Sigura-gura, Kecamatan Lowokwaru. Diketahui, kondisi tidak sesuai siteplan sehingga diduga menjadi penyebab banjir di wilayah setempat.

Usai melakukan peninjauan langsung di Perumahan Sigura-gura, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Fathol Arifin mengatakan, dalam siteplan perumahan tersebut bangunan rumah pribadi (kavling 21), seharusnya merupakan fasilitas umum (fasum) berupa musala.

Namun, pihak pengembang justru mengalihfungsikan fasum tersebut dan menjual lahan ini kepada pemilik rumah (kavling 21).

Dalam konteks ini, Fathol menyebutkan, ada dua aspek utama yang menjadi perhatian Komisi C. Pertama, persoalan banjir yang menurutnya telah menjadi PR besar bagi Pemkot Malang, dimana Komisi C sebagai lembaga eksekutif yang juga turut bertanggung jawab atas penyelesaian permasalahan tersebut.

"Fasum yang terbangun untuk rumah pribadi ini harus dikembalikan fungsi awalnya sesuai dengan siteplan. Sehingga keluhan banjir dari masyarakat di sini tidak lagi terulang. Karena Kavling 21 itu tidak ada dalam siteplan, harusnya di sini ada fasum musala," ujar Fathol, Minggu (2/6/2024).

Fathol menambahkan, setidaknya Perumahan Sigura-gura telah terkena dampak banjir selama 4 kali saat musim hujan. Dampak terbesar dirasakan warga pada November 2023 lalu, dimana ketinggian air banjir bahkan mencapai 3 meter.

Oleh karena itu, pihaknya menegaskan perlu untuk segera melakukan normalisasi saluran drainase di lokasi tersebut. Dengan

melakukan pembongkaran bangunan yang kini berdiri di atasnya.

Di sisi lain, ketika disinggung kemungkinan protes dari pemilik bangunan kavling 21, Fathol menjelaskan bahwa tindakan pembongkaran yang akan diambil telah sesuai dengan aturan normatif.

"Kami menyesuaikan aturan normatif saja, yang artinya memang ada pembongkaran untuk mengembalikan ke fungsi awal sebagai fasum," katanya. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR-PPK Kota Malang, Dandung Djulharjanto menegaskan, pihaknya akan mengikuti arahan dari Komisi C DPRD Kota Malang. Mengamini pernyataan Fathol, Dandung juga menyebutkan bangunan yang berdiri di atas saluran drainase ini harus dikembalikan sebagaimana fungsi awal, sesuai dengan siteplan yang dikeluarkan.

"Yang jelas memang terjadi pelanggaran di sini, di kavling 21 ini. Sekarang ini kita bukan bicara bongkar atau tidak, tapi kita bicara kembalikan ke fungsi awalnya.

Kalau menurut saya harus dikembalikan sesuai fungsinya. Kalau nggak, hak prasarana sarana utilitas umum (PSU) nya di mana," tegas Dandung. (Santi/Dya)

Sanusi Siap Kembali Maju di Pilkada 2024, DPC PDIP Masih Tunggu Rekomendasi Pusat

MALANG - Petahana Bupati Malang, Sanusi, menyatakan kesiapannya untuk kembali maju dalam Pilkada Kabupaten Malang 2024. Namun, pihak Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kabupaten Malang mengaku masih menunggu rekomendasi resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP terkait calon yang akan diusung.

"Untuk rekomendasi formal masih belum ada. Baru sebatas pembinaan dan pembekalan kepada calon kepala daerah. Jadi, rekomendasi resmi masih belum dikeluarkan," ujar Sanusi, Minggu (2/6/2024).

Sanusi juga menyebutkan, enam kepala daerah incumbent, termasuk dirinya, telah menerima undangan untuk mengikuti pemantapan pemenangan, pembekalan dan pembinaan yang akan diadakan di Bogor pada Jumat (7/6/2024) mendatang.

Sementara itu, disinggung terkait calon pendampingnya, Sanusi mengaku belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut. "Masih belum diputuskan, nanti akan dibicarakan lebih lanjut mengenai siapa yang



Bupati Malang, Sanusi. (Santi/Lenteratoday)

pantas menjadi calon wakil," tambahnya.

Di sisi lain, DPC PDIP Kabupaten Malang hingga saat ini masih menunggu pengumuman rekomendasi dari DPP PDIP terkait calon kepala daerah (cakada) yang akan diusung dalam Pilkada Bupati Malang 2024.

Ketua DPC Kabupaten Malang,

Didik Gatot Subroto, menyampaikan pengumuman tersebut akan disampaikan usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan atau maksimal di awal Juni 2024 ini.

"Insya Allah, pada awal-awal Juni ini akan ada semacam penugasan setelah Rakernas berlangsung," ungkap Didik.

Menurut Didik, terdapat dua nama tokoh politik yang mendaftar sebagai

bakal calon Bupati Malang, yaitu petahana Sanusi dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari daerah pemilihan (Dapil) Jatim VI, Gunawan Wibisono.

Didik menyatakan, kemungkinan kedua tokoh politik tersebut bergabung sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati sangat terbuka. "Semua kemungkinan bisa terjadi karena keputusan ada di tangan DPP PDI Perjuangan," katanya.

Pria yang menjabat sebagai Wakil Bupati Malang ini juga menegaskan, apapun rekomendasi yang diberikan oleh DPP, DPC PDIP Kabupaten Malang akan tegak lurus dan siap menjalankan rekomendasi tersebut.

"Arahan yang diberikan adalah siap berkoalisi dengan partai yang memiliki potensi memenangkan kompetisi di Pilkada Kabupaten Malang 2024," pungkasnya.

Sebagai informasi, DPC PDIP Kabupaten Malang sendiri memperoleh 13 kursi di DPRD Kabupaten Malang pada Pemilu 2024 lalu. Hal ini menempatkannya sebagai partai dengan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Malang. (Santi/Dya)

6 FAKTA FILM LAURA YANG TAYANG SEPTEMBER 2024

FILM Laura akan tayang di bioskop pada 12 September 2024. Meskipun penayangannya masih lama, film ini sudah sangat dinantikan publik karena diangkat dari kisah nyata mendiang Laura.

MD Pictures selaku rumah produksi, akhirnya merilis trailer film Laura pada 27 Mei 2024 di kanal Youtube resmi miliknya. Sejak penayangannya sampai saat ini, trailer tersebut telah mencapai 127 ribu penonton.

Antusias penonton semakin bertambah, saat mengetahui deretan artis papan atas yang berkontribusi dalam film ini. Mulai dari Amanda Rawles, Kevin Ardilova, Carissa Perusset, Maya Hasan, Willem Bevers, Fadi Alaydrus, Jinan Safa, Ony Soraja, Pascal Azhar, dan Niloufer Fadila. Fakta-fakta Film Laura yang diangkat dari kisah nyata:

1. Disutradarai Hanung Bramantyo

Film Laura disutradarai oleh Hanung Bramantyo, nama yang sangat populer di industri perfilman Indonesia. Adapun sejumlah karya Hanung sebelum film ini, seperti Catatan Akhir Sekolah, Ayat-ayat Cinta, Perempuan Berkalung Sorban, dan Bumi Manusia.

Dengan melihat sosok sutradara dalam film Laura, akhirnya membuat sejumlah netizen menaruh harapan besar pada hasil produksi film yang akan tayang pada September tahun ini.

2. Diangkat dari kisah nyata

Film Laura diangkat dari kisah nyata mendiang selebgram Laura Ana. Dalam film ini, menceritakan perjalanan hidup dari sosok wanita cantik tersebut, mulai dari suka maupun duka.

Dimana saat itu, Laura yang masih berusia 19 tahun harus berjuang untuk kesembuhannya dan keadilan atas kasus kecelakaan yang telah menimpanya bersama sang kekasih Gaga Muhammad pada Desember 2019.

Laura mengalami kelumpuhan setelah kecelakaan terjadi, disebabkan karena dirinya menderita Spinal Cord Injury atau cedera tulang belakang. Meskipun kala itu kondisinya tidak dalam keadaan baik-baik saja, hal

tersebut tidak membuat Laura patah semangat. Beberapa bulan sebelum meninggal dunia, dirinya sering mendatangi podcast untuk menceritakan perjuangannya.

3. Pemeran utama Amanda Rawles

Publik selalu dibuat penasaran dengan siapakah sosok yang akan memainkan peran Laura dalam film ini. Tidak sedikit dari mereka takut merasa kecewa, apabila pemeran utama tidak sesuai dengan sosok mendiang Laura.

Namun, saat perilis trailer film yang memperlihatkan bahwa Amanda Rawles merupakan sosok yang memerankan Laura. Kabar ini sangat disambut baik para netizen, terlihat dari berbagai komentar yang menyatakan mereka senang karena Amanda bisa mendalami kepribadian selebgram cantik tersebut.

4. Pakaian mirip dengan aslinya

Pakaian yang digunakan Amanda Rawles dalam film juga turut menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, dalam trailer yang berdurasi kurang dari 2 menit itu, terlihat pemeran utama menggunakan beberapa baju yang mirip dengan mendiang Laura. Salah satunya saat adegan podcast, mereka sama-sama menggunakan hoodie berwarna coklat dengan gaya rambut diikat kebelakang.

5. Suara Amanda

Rawles mirip dengan mendiang Laura Suara Amanda Rawles sebagai pemeran utama membuat publik terkejut. Tidak sedikit dari mereka, menyatakan suara Amanda dalam film tersebut sangat mirip dengan suara mendiang selebgram Laura Ana.

Komentar positif diberikan pada postingan trailer di akun Youtube MD Pictures. Salah satunya yaitu akun @agenrizkycipta4004, "seketika merinding, diluar ekspektasi ternyata gaya bicaranya amanda disini cocok sm alm laura," tulisnya.

6. Penayangan film berdekatan dengan ulang tahun Laura

Film Laura yang akan tayang pada tanggal 12 September 2024, ternyata berdekatan dengan tanggal kelahiran mendiang selebgram tersebut yaitu

pada 20 September.

Sejumlah komentar positif pun bermunculan, mereka menyatakan film dibawah naungan Manoj Punjabi dan sutradara Hanung Bramantyo ini sudah sesuai dengan ekspektasi yang

diinginkan. Selain itu, pemilihan tanggal penayangan yang berdekatan membuat mereka bisa kembali merasakan kehadiran sosok mendiang Laura yang selama ini dirindukan (Bisnis)





KELOMPOK USIA MUDA RAWAN TERSERANG STROKE

STROKE bukanlah penyakit yang hanya menyerang orang lanjut usia saja. Kini, banyak orang usia muda yang berisiko terkena stroke ringan maupun berat.

Hal ini bisa terjadi dari akibat pola hidup yang buruk, kolesterol tinggi, diabetes, dan tekanan darah tinggi.

Tentunya penyakit ini perlu kamu perhatikan gejalanya karena bisa berakibat fatal jika tidak mendapatkan penanganan sesuai.

Terlebih dari itu, mengatasi stroke ringan dengan cekatan bisa meminimalisir serangan stroke yang lebih serius. Simak gejala stroke ringan yang bisa terjadi berikut ini!

Persoalan penyakit stroke memang kerap menimpa kelompok usia di atas 70 tahun. Tapi dalam laporan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mencatat bahwa stroke paling rentan menyerang kelompok usia muda dengan rentang 18-44 tahun.

Dilansir Healthline, CDC menemukan risiko stroke meningkat pada individu di bawah 65 tahun selama 10 tahun belakangan ini.

Para peneliti CDC menyebutkan prevalensi stroke meningkat hampir 8% yang didominasi oleh orang dewasa muda. Pada rentang usia 18-44 terdapat peningkatan prevalensi stroke sebesar 14,6% , sedangkan kategori 45-65 meningkat 15,7%.

"Laporan ini mengkhawatirkan

karena pada populasi muda, angka stroke meningkat dan mereka juga mencatat bahwa tingkat obesitas dan hipertensi meningkat pada orang-orang muda. Itu pertanda buruk," kata Direktur Stanford Center Gregory W. Albers, dikutip dari Medical News Today.

Lebih lanjut, menurut laporan terbaru CDC antara tahun 1999-2000 dan 2017-2018 jumlah penderita hipertensi meningkat 6% di kalangan usia 45-64 tahun.

Di sisi lain, penyakit obesitas juga mengalami peningkatan dari 27,5% menjadi 43% pada laki-laki dan 41,9% pada perempuan.

Lalu, setidaknya terdapat peningkatan obesitas sebesar 44,8% di tahun 2017-2018 pada individu yang berusia 40 hingga 59 tahun.

Jika dirincikan berdasarkan demografi, laporan terkait stroke meningkat 9,3% pada wanita, 6,2% pada pria, 16,1% pada orang hispanik, 7,8% pada orang dewasa berkulit hitam, 7,2% orang dewasa berkulit putih, dan 52,3% pada penduduk asli Hawaii.

Ahli saraf di Klinik Cleveland, Abbas Kharal mengatakan rentannya penyakit stroke pada kalangan usia muda disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat.

Mengonsumsi makanan tinggi kalori, lemak, dan makanan ultra proses serta jarang berolahraga

merupakan faktor utama stroke di usia dini.

"Khususnya pada orang dewasa muda, kita melihat peningkatan signifikan pada arteriosklerosis yaitu pengerasan dan penyumbatan pembuluh darah. Hal ini secara khusus diyakini disebabkan oleh peningkatan faktor risiko vaskular stroke pada pasien yang lebih muda," kata Abbas, dikutip dari Cleveland Clinic.

"Kami melihat kejadian tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi dan diabetes terjadi pada pasien yang lebih muda di usia akhir 20-an hingga awal 30-an. Penyakit-penyakit ini secara tradisional dikaitkan dengan populasi yang jauh lebih tua," lanjutnya.

Seperti diketahui bahwa stroke disebabkan oleh penyumbatan atau pembekuan darah pada arteri sehingga mengakibatkan otak tidak menerima darah secara cukup.

Selain itu, kelainan pembuluh darah, penyakit jantung, dan penggunaan narkoba. Oleh sebab itu, penting untuk menjaga asupan makanan kaya akan nutrisi yang didapatkan dari buah dan sayur-sayuran.

Lalu, batasi konsumsi makanan ultra proses yang mengandung kadar lemak jenuh, garam, dan gula cukup tinggi.

Pastikan juga rutin berolahraga agar semua nutrisi makanan tersalurkan dengan baik ke semua organ tubuh. (Bisnis/halodoc)

MENGENAL GEJALA STROKE

Berikut gejala stroke pada orang dengan usia muda. Jika kamu memiliki gejala berikut, sebaiknya segera mendapatkan perawatan medis:

- Nyeri kepala berat.
- Perubahan penglihatan.
- Lemas.
- Kebingungan.
- Kesulitan berbicara.
- Kesulitan dalam memahami Tingkah laku yang tidak biasa.
- Penurunan kewaspadaan.
- Kesulitan berjalan.
- Buruknya keseimbangan.

Stroke di usia muda dapat mengubah hidup. Pelajari lebih lanjut mengenai bagaimana mendapatkan pertolongan dan dukungan. Rehabilitasi pasca stroke bisa membantu mencapai hasil terbaik yang dapat mengarah pada kehidupan bahagia, sehat, dan produktif.

FENOMENA UNIK, ENAM PLANET BAKAL DALAM POSISI SEJAJAR

SEBUAH fenomena astronomi unik dan langka berupa planet berjejer atau planetary alignment bakal mewarnai langit menjelang matahari terbit pada 3-4 Juni 2024 sekitar pukul 05.15 WIB.

Peneliti Pusat Riset Astronomi dan Astrofisika BRIN Thomas Djamaluddin mengatakan ada enam planet berjejer sepanjang ekliptika, yaitu Jupiter, Merkurius, Uranus, Mars, Neptunus, dan Saturnus.

"Fenomena planet berjejer itu bisa dilihat dari atas kepala hingga ufuk timur," ujarnya di Jakarta.

Thomas menuturkan Saturnus dapat dilihat dengan mata biasa seperti bintang terang, sementara Neptunus dan Uranus hanya bisa terlihat dengan teleskop.

Kemudian planet Mars akan tampak seperti bintang berwarna agak merah, Merkurius terlihat seperti bintang redup menjelang matahari terbit, dan Jupiter juga tampak redup.

Menurutnya, hanya planet terang yang bisa terlihat terutama saat langit masih gelap.

"Saturnus dan Mars hanya tampak sebagai titik cahaya seperti bintang. Jupiter terbit menjelang matahari terbit, kemungkinan tidak teramati," kata Thomas.

Fenomena planet berjejer merupakan kejadian biasa dan sering terjadi karena planet-planet dekat bidang orbit bumi mengitari matahari, sehingga selalu berada di sekitar ekliptika.

Menurut Thomas, fenomena kali termasuk langka karena jumlah planet yang berjejer jarang berjumlah lebih dari tiga planet.

Fenomena enam planet berjejer tidak memberikan dampak apapun terhadap bumi. Jika diamati dengan mata biasa, planet hanya terlihat sebagai titik cahaya seperti bintang, namun dengan teleskop bisa melihat cincin Saturnus.

Semua planet mengitari matahari dengan periode tertentu, ada yang satu tahun dan ada pula yang lebih dari satu tahun.

Hal ini bisa dihitung dan dimodelkan ketampakannya di langit, sehingga jauh-jauh hari sudah bisa diperkirakan.

Fenomena planet berjejer bisa diprediksi dengan menggunakan aplikasi gratis seperti Stellarium yang dapat mensimulasikan fenomena itu mulai dari titik terbit hingga kira-kira di atas kepala kita.

Mitos yang mengelilingi fenomena

planet berjejer sering kali diramalkan oleh masyarakat sebagai pertanda sesuatu akan terjadi, namun ini didasarkan pada kepercayaan, bukan logika sains.

"Melalui fenomena planet berjejer kita bisa memberikan inspirasi bagi para siswa untuk mempelajari sains yang meskipun rumit tetapi menyenangkan," pungkash Thomas.

Terdapat beberapa mitos dan kekeliruan informasi di tengah masyarakat terkait fenomena planet sejajar ini.

BERIKUT BEBERAPA DI ANTARANYA.

1. Tidak benar-benar sejajar

Seperti disebutkan sebelumnya, Bulan dan planet-planet yang tampak sejajar di langit beberapa hari belakangan, sebenarnya tidak terletak bujur ekliptika yang sama. Ekliptika adalah lintasan bidang edar benda-benda langit.

Kemungkinan untuk planet-planet berada dalam garis yang benar-benar sejajar hanya akan terjadi dalam miliaran tahun.

"Kemungkinan segarisnya delapan planet ini bisa mencapai milyaran

tahun. Artinya, dalam umur 4,5 miliar tahun Bumi dan tata surya, segarisnya delapan planet ini hanya terjadi 2-3 kali saja,"

2. Mitos Hades

Terkait dengan fenomena planet sejajar, lekat dengan film animasi lawas garapan Disney berjudul "Hercules" yang dirilis pada 1997. Film ini terinspirasi dari mitologi Yunani klasik dan mengangkat beberapa tokoh dewa-dewa Yunani, termasuk Hades.

Hades, nama lain dari Pluto atau Pluton, merupakan saudara dari dewa Zeus. Dilansir dari Britannica, Hades dikenal sebagai sosok yang keras dan kejam. Ia bertugas mengadili dan menghukum orang jahat di dunia setelah kematian.

Dikutip dari Insider.com edisi 20 September 2020, pada film tersebut, diceritakan bahwa dalam 18 tahun, jika Hades melepaskan para Titan saat planet-planet sejajar, dia akan memiliki kesempatan untuk merebut kekuasaan Zeus. Tentu ini fiksi.

Kenyataannya, seperti yang disebutkan oleh Andi, butuh milyaran tahun bagi planet-planet untuk benar-benar berada di posisi sebaris di tata surya (Antara/Kopas)





3 PERAWATAN DASAR AGAR LANSIA TIDAK MENGALAMI KULIT KERING

JAKARTA-Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri). Sebab, pembahasan revisi UU Polri menuai banyak kontroversi dari publik.

Dokter spesialis kulit dan kelamin dr. Arini Astasari Widodo Sp.DVE menyarankan tiga perawatan dasar atau skincare terbaik untuk lansia yang memiliki kulit lebih sensitif dibanding yang lebih muda.

"Pertama pastikan penggunaan cleanser yang lembut, kalau gunakan pembersih usahakan tidak buat kulit kering, cleanser tidak menggunakan istilah sabun karena sabun mengandung banyak detergen, alkali sehingga hal-hal ini memicu masalah kulit pada lansia di kemudian hari," kata Arini dalam diskusi terkait Hari Lansia Nasional 2024 yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.

Arini melanjutkan, penggunaan pelembab atau moisturizer pada lansia juga bisa jadi lebih banyak dibandingkan dengan dewasa pada umumnya karena harus menggantikan kelembaban kulit yang menurun.

Penggunaan pelembab bisa lebih optimal pada lansia jika dipakai pada 5 menit setelah mandi untuk mengunci kelembaban yang ada di dalam kulit

sehingga menjadikan kulit tetap kenyal.

Selain itu, yang tidak kalah penting adalah penggunaan tabir surya untuk mencegah permasalahan kulit yang lebih ekstrim seperti kanker kulit yang berbahaya.

"Seorang lansia lebih rentan kalau terkena matahari bisa kena kanker kulit, tentunya dia tumor ganas pada kulit bisa membahayakan jiwa kalau kanker ganasnya melanoma, bisa juga tumor jinak kulit, ada pre kanker yang belum terjadi kanker," kata Arini.

Masalah pigmentasi kulit dan penuaan akibat paparan sinar matahari juga dapat membuat masalah pada kulit lansia. Pigmen kulit yang seharusnya dapat menangkal sinar matahari berkurang karena penuaan dan bisa menyebabkan kulit lansia mudah terbakar (sunburn).

Tips lainnya dalam menjaga kulit lansia agar tidak terlalu kering adalah tidak mandi terlalu lama dan pastikan menggunakan air yang tidak terlalu panas atau di suhu 37 derajat celsius.

Saat mandi, kata Arini, sabun atau pembersih jangan dibiarkan terlalu lama di kulit dan harus dibilas bersih supaya kulit tidak mudah iritasi.

"Lebih baik dibatasi mandi kurang

dari lima menit dan kontak dengan pembersih jangan terlalu lama, karena pembersih sifatnya harus harus dibilas jadi mandi harus dibilas bersih, kadang sabun ketinggalan di kulit bisa mudah iritasi," kata Arini.

Tiga produk perawatan kulit

Arini menyarankan cleanser atau produk pembersih wajah karena sifatnya lebih lembut di kulit ketimbang sabun, kemudian mengandung lebih sedikit detergen dan busa sehingga tidak membuat kulit semakin kering. Di sisi lain, produk cleanser umumnya memiliki pH yang sama dengan kulit serta mengandung pelembap seperti gliserin dan ceramide.

Produk berikutnya yang juga disarankan bagi lansia yakni pelembap. Secara umum, ada tiga jenis pelembap yang beredar yakni dengan sifat menarik air kulit, mengisi celah-celah kulit dan menghambat penguapan air dari kulit.

Arini mengatakan, dalam memilih pelembap sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kulit lansia dan seberapa kering kulitnya mengingat spesifikasi yang berbeda dari setiap produk.

Berdasarkan konsistensinya, pelembap yang lengket, tebal seperti

krim bisa dipilih untuk kulit yang sangat kering. Sementara pada kulit yang tidak terlalu kering atau untuk pemakaian sehari-hari, maka pelembap dengan jenis losion disarankan karena lebih nyaman di kulit.

Perhatikan juga waktu mengaplikasikan pelembap. Menurut Arini, pelembap sebaiknya dipakai segera setelah mandi.

Produk terakhir yakni tabir surya karena mampu melindungi kulit dari paparan sinar matahari yang menyebabkan masalah kulit termasuk penuaan, kulit terbakar matahari atau sunburn dan memicu kanker kulit.

Arini menyarankan tabir surya dengan SPF 30 pada lansia dan produk dengan proteksi terhadap UVA yang biasanya dapat dilihat dari label kemasannya (tulisan spektrum luas atau tulisan PA ++). Selain itu, sebaiknya perhatikan pemakaian tabir surya yang tepat sisi jumlah dan frekuensi pengulangannya.

Selain ketiga skincare seperti yang disebutkan, dia juga mengingatkan lansia tentang durasi mandi yang sebaiknya tidak terlalu lama dan hindari sabun-sabun dengan sifat antiseptik karena dapat membuat kulit semakin kering (Antara)

"Pertama pastikan penggunaan cleanser yang lembut, kalau gunakan pembersih usahakan tidak buat kulit kering, cleanser tidak menggunakan istilah sabun karena sabun mengandung banyak detergen, alkali sehingga hal-hal ini memicu masalah kulit pada lansia di kemudian hari,"

dr. Arini Astasari Widodo Sp.DVE



Sudah 61 WNI ... (dari Hal 1)

BILA musim haji sebelum-sebelumnya, kendala transportasi hingga catering menjadi sorotan, tahun ini huru-hara terjadi karena puluhan WNI ditangkap pemerintah Arab Saudi. Pengetatan aturan terkait visa haji membuat jamaah yang nekat memakai visa ziarah diperiksa aparat setempat.

Diketahui, aparat keamanan Arab Saudi kembali menahan jamaah Indonesia yang menggunakan visa ziarah untuk berhaji. Terbaru, 37 orang asal Makassar ditangkap di Madinah.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (1/6/2024) kemarin pukul 11.00 waktu Arab Saudi (WAS). Hal itu diungkapkan Konjen RI Jeddah Yusron B Ambarus usai kunjungan ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Makkah.

"37 orang ditangkap di Madinah oleh aparat keamanan di Madinah, 16 perempuan, laki-laki 21 orang. Dari Makassar," ujar Yusron dikutip Minggu (2/6/2024).

Selain itu, pengemudi dan kenek busnya dari Yaman pun ditahan. "Katanya sewa bus 17 ribu riyal," ujarnya.

Menurut Yusron mereka terbang dari Indonesia ke Doha, lalu ke Riyadh. "Dari Riyadh ke Madinah. Mereka ditangkap di dalam bus," kata Yusron.

Dari hasil pemeriksaan aparat keamanan, diketahui mereka menggunakan atribut haji palsu. "Gelang haji palsu, kartu ID palsu dan ada juga yang memalsukan visa haji," terang Yusron.

Dari 37 orang itu, ada seorang koordinator berinisial SJ. Dia menggunakan visa multiple yang berlaku untuk 1 tahun. "Jadi setelah 3 bulan kembali ke Indonesia, terus bisa kembali lagi," ujarnya.

Selain SJ, lanjutnya, ada satu orang koordinator lainnya yang sedang diburu inisial TL. "37 orang yang sudah ditangkap saat ini sedang diperiksa kepolisian. Di sini proses pemeriksaan cepat," kata dia.

Menurutnya sebelum penangkapan 37 orang ini, ada juga 19 orang yang diamankan namun dibebaskan kembali karena tidak terbukti mereka akan berhaji.

"Mereka mengaku akan pergi ke keluarganya di Jeddah, tim KJRI berhasil membantu mereka untuk dibebaskan. Kami minta mereka segera pulang dan tidak coba-coba untuk berhaji," katanya.

Yusron kembali mengimbau agar masyarakat Indonesia menaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Sanksinya cukup berat yaitu denda 10 ribu riyal (sekitar Rp 43 juta) dan banned 10 tahun. Untuk Koordinator lebih berat lagi, denda 50 ribu riyal (sekitar Rp 216 juta), ditahan 6 bulan, dan banned 10 tahun.

"Marilah kita taati ketentuan pemerintah Arab Saudi, jangan sampai uang hilang haji melayang," tandasnya.

Sementara untuk 22 orang yang ditangkap di Bir Ali saat akan

mengambil miqat, kata dia, telah diterbangkan ke Tanah Air. Diketahui, aparat keamanan Arab Saudi sebelumnya mengamankan 24 jamaah RI yang menggunakan visa ziarah untuk haji. Mereka ditangkap saat miqat di Bir Ali.

Peristiwa itu terjadi pada Selasa (28/5/2024). Rombongan jamaah asal Banten itu mengaku sebagai jamaah haji furoda.

"Tadi ada bus masuk ke Bir Ali saat dicek ternyata bukan jamaah kita. Mereka bilang jamaah furoda namun tidak bisa menunjukkan identitas selain paspor," kata Kepala Seksi Sektor Bir Ali, Aziz Hegemur kepada Media Center Haji, Rabu (29/5/2024).

Dari hasil pemeriksaan, 22 jamaah dinyatakan tidak bersalah dan dideportasi. Sementara 2 lainnya yang bertindak sebagai koordinator masih ditahan untuk menjalani proses hukum.

Bagi pelaku yang terbukti bersalah, bisa dikenai denda 10.000 riyal, deportasi, dan dilarang masuk Arab Saudi selama 10 tahun. Bagi penyelenggara haji tanpa izin resmi, hukumannya lebih berat, yakni denda 50.000 riyal, hukuman enam bulan penjara, dan larangan masuk Arab Saudi selama 10 tahun. Sementara, jika ketahuan melakukan kesalahan berulang, hukumannya bisa berlipat ganda.

Diketahui, Pemerintah Arab Saudi memperketat jalur masuk Mekkah untuk mengantisipasi kedatangan jamaah haji ilegal yang tidak memiliki visa haji. Sehingga proses ibadah pada puncak haji nanti bisa berjalan dengan aman dan lancar. Ketua Petugas

Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Nasrullah mengatakan, jamaah yang datang dari Jeddah akan melewati 2 titik check point. "Kalau dari Jeddah ke Mekkah ini ada 2 (check point). Jadi, pertama di Shumaisi. Dan yang kedua yang pas biasa cek orang umrah itu, di daerah Zaidi," ujar Nasrullah.

Di sisi lain, Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan (Sulsel) menangkap 37 jamaah asal Kota Makassar akan dipulangkan usai kedatangan berangkat haji menggunakan visa haji palsu. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah akan mengawal pemulangan mereka ke Indonesia.

"Sementara proses (pemulangan) dan didampingi pihak KJRI," kata Kepala Bidang Pelaksanaan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Sulsel Ikkal Ismail, Minggu (2/6/2024).

Ikkal tidak merinci kapan jadwal pemulangan 37 jamaah tersebut. Namun dia menegaskan pemulangan ini karena mereka telah melanggar aturan pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan haji.

"Kalau dipulangkan jelas dipulangkan. Hanya dalam aturan pemerintah Saudi sekarang itu bahwa bila ada jamaah haji didapat tidak menggunakan visa haji akan dikenakan denda juga," ujarnya.

Ikkal pun mengimbau masyarakat yang hendak berhaji agar menaati aturan yang telah ditetapkan. Dia juga

mengingatkan untuk tidak melakukan haji menggunakan visa di luar haji.

"Jadi dari awalkan pemerintah sudah menyampaikan agar jangan coba-coba untuk menggunakan visa lain selain itu tadi untuk melaksanakan ibadah haji," tutur Ikkal.

32 Jamaah Meninggal Dunia

Kabar duka datang dari jamaah Indonesia. Sebanyak 32 jamaah haji asal Indonesia meninggal dunia di Arab Saudi dalam tiga pekan operasional ibadah haji atau hingga hari ini, Minggu (2/6/2024).

"Jamaah yang wafat di Tanah Suci hingga saat ini berjumlah 32 orang. Seluruh jamaah wafat akan dibadahlajikan," ujar anggota Media Center Kementerian Agama Widi Dwinanda dalam keterangannya.

Penerbangan perdana jamaah haji Indonesia telah dilakukan pada 12 Mei lalu. Widi menjelaskan jumlah jamaah haji yang sudah tiba di Tanah Suci berjumlah 154.410 orang yang terbagi dalam 393 kelompok terbang hingga Minggu ini.

Widi menjelaskan seluruh jamaah haji di Madinah telah diberangkatkan ke Makkah untuk melaksanakan umrah wajib dan dilanjutkan menjalani tahapan puncak haji.

"Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daerah Kerja Madinah, melepas rombongan terakhir Gelombang I dari Kloter BPN 07 usai mengambil miqat di Bir Ali dan berangkat menuju Makkah untuk melaksanakan umrah wajib pada pukul 09.34 WAS," kata dia.

Bagi para jamaah yang masih sakit dan dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan rumah sakit di Madinah, akan dibawa ke Makkah diantar oleh petugas KKHI.

Widi menjelaskan momen menjalani puncak haji di Arafah, Muzdalifah, Mina dan lempar jumrah menuntut kesiapan prima, khususnya ketahanan fisik.

"Masa menunggu puncak haji tersebut, selain mendalami manasik haji, banyak jamaah yang memanfaatkan waktu tersebut untuk tawaf sunah atau ibadah umrah, bahkan sebagian jamaah melakukan umrah hingga berkali-kali," katanya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama menerbitkan Surat Edaran Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Nomor 04 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran DAM/Hadyu Tahun 1445 H/2024 M.

Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie mengatakan edaran ini terbit sebagai bagian dari upaya melindungi jamaah haji sekaligus memastikan pengelolaan pemotongan dam berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.

"Edaran terbit selain agar pelaksanaan dam sesuai ketentuan hukum Islam atau Syariah Compliance, juga dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan daging hewan dam/hadyu (utilization of meat)," sebut Anna Hasbie di Jakarta, Minggu (2/6/2024).

Edaran ini juga menginformasikan lembaga yang bisa menjadi tempat membayar dam, yaitu Rumah Pemotongan Hewan atau RPH Al-Ukaisiyah dan RPH Adhahi.

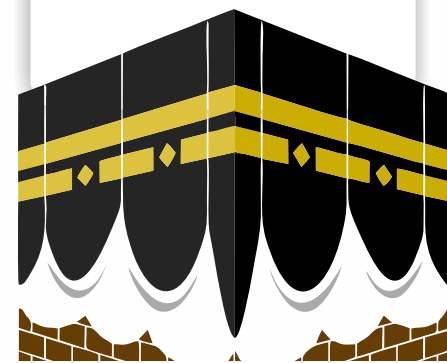
Dalam petunjuk teknis ini, terdapat standar dan komponen biaya DAM yang dapat dijadikan acuan para jamaah dan petugas.

"Untuk RPH Adhahi, biaya yang dibayarkan sebesar SR 720. Ini untuk membayar tujuh komponen, yaitu harga kambing, jasa penyembelihan, pengulitan, pembersihan perut, pendinginan (storage cold), packing, serta biaya pengiriman dan distribusi," jelas Anna.

Sementara, bila jamaah dibayarkan ke RPH Al Ukaisiyah dikenakan biaya sebesar SR 580. Pembayaran DAM di RPH Al Ukaisiyah meliputi harga kambing, jasa penyembelihan, pengulitan, pembersihan perut, pendinginan (storage cold); packing, pengolahan daging dengan proses retort, serta biaya pengiriman dan distribusi. (wid,rls,ant,ist/dya)

Larangan yang Harus Dihindari Jamaah Selama Haji 2024

- **Membentangkan Spanduk**
Otoritas Saudi melarang jamaah bertato serta penggunaan spanduk atau identitas kelompok selama haji.
- **Berkerumun Lebih 5 Orang**
Arab Saudi melarang jamaah berkerumun lima orang atau lebih dalam waktu lama karena dapat menghambat alur pergerakan dan menimbulkan kecurigaan.
- **Membuat Video dengan Durasi Terlalu Lama**
Otoritas Saudi melarang rekaman dengan alat pendukung seperti tripod dan mikrofon. Jika melanggar, alat perekam ditahan dan rekaman dihapus.
- **Buang Sampah**
Pengelola masjid di Arab Saud memberlakukan peraturan yang sangat ketat dalam menjaga kebersihan di kawasan masjid.
- **Mengambil Barang Temuan**
Jamaah haji Indonesia diingatkan untuk tidak mengambil barang yang tergeletak di masjid dan sekitarnya. Meskipun niatnya untuk mengamankan, tindakan ini bisa disalahartikan sebagai pencurian.
- **Merokok**
Jamaah sering melanggar aturan merokok di kompleks masjid. Sebaiknya merokok di tempat jauh dari masjid untuk menghindari peringatan atau proses hukum.



Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim Lakukan Pengawasan di Perairan Umum Daratan Kabupaten Blitar



BLITAR- Provinsi Jawa Timur memiliki 16 Kabupaten/Kota yang hanya mempunyai perairan umum daratan. Salah satunya adalah Kabupaten Blitar.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur (Jatim) melalui Sub Substansi Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan melakukan kegiatan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan pada semua sub sektor kegiatan pemanfaatan sumberdaya

kelautan dan perikanan pada hari Rabu (15/5/2024)

Kegiatan ini diperlukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan dari terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Sehingga, pelanggaran atau tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan dapat diminimalisir. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah melaksanakan pengawasan usaha perikanan tangkap di Perairan Umum Daratan (PUD) di Kabupaten Blitar. Adapun tim terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Poskamradu Tambakrejo, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.

Kegiatan pengawasan usaha perikanan tangkap di PUD dilaksanakan sebagai upaya tindak

lanjut adanya penggunaan setrum dalam melakukan usaha penangkapan ikan di Sungai Brantas Kabupaten Blitar. Usai dilakukan pengawasan, diharapkan masyarakat tidak akan melakukan lagi.

Sebab penangkapan ikan dengan menggunakan setrum mempunyai dampak negatif terhadap kelestarian sumberdaya ikan serta untuk mencegah terjadinya konflik antar Masyarakat di daerah tersebut.(ADV)

Peneliti BRIN Sebut 'Bola' Putusan MA Ada di Tangan KPU dan Kaesang

JAKARTA-Polemik Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah batasan syarat usia minimum calon kepala daerah disoal karena diputus jelang pendaftaran bakal pasangan calon makin memanas. Jika diterapkan saat Pilkada 2024, putusan itu pun bakal dinilai politis.

Menurut peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli, rangkaian kontroversi yang meliputi putusan tersebut ada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

Lili menjelaskan, Kaesang saat ini masih berusia 29 tahun dan baru genap 30 tahun pada Desember mendatang. Tafsir terbaru syarat minimal calon gubernur-wakil gubernur berdasarkan putusan MA

adalah usia saat dilantik sebagai pasangan calon terpilih. Ini berbeda dengan norma dalam Peraturan KPU sebelumnya yang mematok batasan usia calon kepala daerah saat pendaftaran bakal pasangan calon.

KPU sendiri sudah menetapkan tahapan pencalonan bakal pasangan kepala daerah pada 27-29 Agustus 2024. Jika KPU mengubah Peraturan KPU berdasarkan putusan MA terbaru, Kaesang berpotensi ikut dalam kontestasi Pilkada 2024. Oleh karena itu, Lili menyebut, "Bolanya sekarang ada di KPU."

"Apakah KPU akan menolak putusan itu dengan alasan putusan MA tidak berlaku surut karena tahapan pendaftaran calon perseorangan sudah dimulai. Atau sebaliknya, KPU akan menerima putusan MA tersebut,"

kata Lili dikutip Minggu (2/6/2024).

Selain KPU, Lili juga mengatakan bahwa Kaesang sendirilah yang bakal menjawab dugaan politisasi putusan MA tersebut jika pada akhirnya KPU mengubah tafsir syarat usia calon kepala daerah berdasarkan putusan MA pada Pilkada 2024. Dugaan publik akan adanya politisasi lembaga peradilan untuk memuluskan kandidasi sosok tertentu dinilai terbukti apabila Kaesang memanfaatkan putusan MA tersebut.

"Jika KPU memutuskan berlaku pada Pilkada 2024 ini dan Kaesang juga maju dalam Pilgub Jakarta, berarti ini sama seperti Pilpres 2024, di mana putusan Mahkamah Konstitusi memberi karpet merah bagi Gibran. Kini MA juga memberikan karpet merah buat Kaesang dalam Pilkada

2024," tandas Lili.

Senada, pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menduga adanya kepentingan politik untuk memuluskan Kaesang Pangarep maju Pilkada 2024 terkait putusan Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, pola itu sudah dilakukan sebelumnya untuk Gibran Rakabuming Raka, dan terbukti sukses.

"Kita memang lazim melihat pola yang sudah terjadi dan pola oleh keluarga ini kan sudah kelihatan waktu MK dengan bantuan paman Anwar Usman membuat pasal berubah. Pervis polanya, cuma beda institusinya, satu MK, satu lagi MA," katanya.

"Jadi pola itu bisa jadi salah satu alasan kenapa publik boleh menduga bahwa ini adalah sebuah modus operandi," ucap Bivitri Susanti menambahkan.(wid,rls,min,ist/kum)